



JADI SAKSI: Dewa Ayu Yulianti Wijaya (paling kiri) sempat dibentak hakim karena berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

Pemilik SPBU "Dibantai" Hakim

DENPASAR - Kasus korupsi dana BBM di Jembrana sebelumnya menyeret mantan Kadisperindag Ni Made Ayu Ardini, selanjutnya anggota DPRD Jembrana I Made Sueca Antara. Dalam sidang kemarin (12/8), ada dua saksi

yang dihadirkan. Saksi pertama adalah salah satu pegawai Abdul Haris Isyaini dan pemilik SPBU Penyaringan Dewa Ayu Yulianti Wijaya. Hakim cenderung keras dengan dua saksi ini. Terutama Dewa Ayu Yulianti yang benar - benar "dibantai".

Sidang dipimpin oleh hakim ketua Patensili didampingi oleh hakim Beslin Sihombing dan Miftahul. Jaksa Suhadi lebih awal menghadirkan Abdul Haris. Saksi ini awalnya mengaku kenal terdakwa, namun terdakwa membantah. Akhirnya, saksi mengakui hanya pernah melihat. Selain itu saksi ini juga sempat dihardik memberikan penjelasan. "Kalau Saudara saksi bohong, jangan terus diperkuat. Bingung nanti Saudara menjelaskan. Yang jujur ya, Saudara sudah disumpah," ungkap hakim Pentensili dan membuat saksi minta maaf.

Saat saksi Dewa Ayu Yulianti Wijaya dihadirkan, sidang mulai panas. Lantaran ibu paruh baya, ini dianggap berbohong. Dia langsung membatasi posisinya sebagai pemilik, dengan mengatakan bahwa dirinya baru memimpin SPBU ini tahun 2015. "Sebelumnya orang tua saya, setelah meninggal baru saya," ujarnya.

Tujuannya jelas, untuk memposisikan dirinya seolah tidak tahu akan kasus ini

► *Baca **Pemilik...** Hal 31*

Soal Uang Tahu,

Proses Tak Tahu

■ PEMILIK

Sambungan dari hal 21

Namun, hakim terus mengejar dan sampai akhirnya saksi terpojok gara - gara ditanya terkait dengan penanggungjawab SPBU ini. "Manajer saya, Pak. Dia bernama Suryanta. Saya hanya telepon minta laporan," kilahnya.

Jawaban ini membuat suara hakim meninggi. "Kok, bisa hanya minta laporan, Ibu yang punya. Apa mau SPBU ini Ibu serahkan cuma - cuma ke manajer, Ibu?" tanya hakim.

Ternyata saksi menjawab mau menyerahkan. "Ini jawaban konyol. Ibu kalau bohong *mikir - mikir, dong. Kok*, bisa Ibu mau menyerahkan. Kita di sini dikasih SPBU pasti mau," hardik hakim Beslin menimpali.

Setelah mulai terpojok, akhirnya dia mengaku tidak tahu menahu. Hakim meminta agar manajernya Suryanta dihadirkan. Jaksa mengatakan sebenarnya hari ini sudah dipanggil, tetapi mangkir dengan alasan *ngaben*.

Kemudian hakim kembali bertanya terkait keuntungan. Saksi mengatakan Rp 20 juta. Atas penjelasan yang mulai terbuka, hakim menanyakan rekomendasi SPBU untuk minyak bersubsidi. Kembali saksi menjawab tidak tahu. "Kalau begini tahu saya, kalau uang tahu, kalau proses *nggak tahu, gitu. Gini aja*, tolong saat nanti dikonfrontasi jujur, biar *nggak* banyak yang masuk penjara. Dan, Ibu mesti sadar kami bisa merekomendasi agar SPBU Ibu ditutup," teriak Patensili. (*art/yes*)

Edisi : Kamis, 13 Agustus 2015

Hal : 21 dan 31



SK TPG Guru Kota Gabeng

Masih Tergantung
Pusat, Dikhawatirkan
Akan Jadi Silpa

DENPASAR - Belum keluarnya Surat Keputusan Tunjangan Profesi Guru (SK TPG) dari pemerintah pusat kepada sekitar 150-200 guru di Kota Denpasar, dikhawatirkan akan mengakibatkan munculnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) untuk tahun anggaran 2015 ini. Pasalnya, hingga kemarin SK TPG ratusan guru di Kota Denpasar tersebut masih *gabeng* (belum ada kejelasan).

Apalagi jika berkaca pada tahun anggaran sebelumnya menyebutkan angka Silpa Denpasar tahun 2014 mencapai Rp 281,93 miliar lebih, hampir 50 persennya dari pos pendidikan yang mencapai Rp 100 miliar. "Kami akui angka Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran, Red) tahun 2014 kemarin itu didominasi dari anggaran belanja tidak langsung," ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar IGN Eddy Mulya, dihubungi koran ini, Rabu kemarin (12/8).

Silpa tahun 2014 yang didominasi dari anggaran belanja tidak langsung, menurut Eddy Mulya, diakibatkan adanya gaji pegawai terutama TPG yang belum dibayar karena SK TPG yang dikeluarkan pemerintah pusat molor.

"Kondisi ini lah yang banyak menimbulkan Silpa. Kami juga tidak mungkin serta merta menggunakan Silpa itu untuk keperluan pos lain. Sekarang tidak boleh begitu," tegasnya.

Mantan Asisten II Setda Kota

Kami juga tidak mungkin serta merta menggunakan Silpa itu untuk keperluan pos lain. Sekarang tidak boleh begitu."

IGN Eddy Mulya

Kadisdikpora Kota Denpasar

Denpasar ini memperkirakan, angka Silpa di tahun 2015 ini akan lebih berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan alasan, walaupun ratusan SK TPG belum dikeluarkan dari pusat, tetapi SK PNS tahun 2014 sudah turun. "Walaupun ada ratusan SK TPG belum keluar dari pemerintah pusat, tetapi paling tidak SK PNS yang sudah tertahan sejak tahun 2014 lalu, tahun 2015 ini sudah keluar. Yang secara langsung akan membuat belanja tidak langsung bisa terpakai," jelasnya.

Sementara itu, dari data yang berhasil dihimpun koran ini menyebutkan bawa, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2014 mencapai Rp 281,93 miliar lebih. Nilai ini lebih besar dibandingkan Silpa tahun 2012 yang mencapai Rp 257 miliar lebih dan Silpa tahun 2013 Rp 222,36 miliar. Dan yang paling besar penyumbang Silpa di Kota Denpasar adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar yang besarnya mencapai Rp 100 miliar lebih, yang akhirnya sejumlah program tidak bisa terrealisasi dengan baik. (**hen/han**)

Edisi : Kamis, 13 Agustus 2015

Hal : 24